



Penghuni Kos Harus Kelola Sampah

YOGYA, TRIBUN - Permasalahan limbah di Kota Yogyakarta perlahan mulai menemukan titik temu, seiring deretan terobosan yang digulirkan pemkot. Terbaru, gerakan Mbah Dirjo (Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja) menjadi gebrakan untuk upaya pengolahan limbah jenis organik.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan, lewat gerakan Mbah Dirjo, setiap warga masyarakat wajib mengolah limbah organik

sejak dari level rumah tangga. Dengan begitu, sampah organik yang diproduksi penduduk tidak perlu dialokasikan menuju tempat pembuangan akhir (TPA).

Sebagai informasi, TPA Piyungan sejauh ini masih dibuka secara terbatas, khusus untuk sampah dari Kota Yogyakarta dengan volume pembuangan 100 ton per hari. Oleh sebab itu, pemkot masih harus memutar otak, mengingat sampah yang tersisa serta tidak dapat ter-

buang ke TPA pun masih cukup tinggi.

Benar saja, gerakan zero sampah anorganik yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2023 masih menyisakan sekitar 200 ton limbah per hari yang belum terkelola. Alhasil, dengan kuota TPA Piyungan yang hanya 100 ton per hari, sekitar 100 ton sampah pun berpotensi menumpuk jika tak diambil upaya khusus. "Jadi, Mbah Dirjo

● ke halaman 11

Penghuni Kos Harus Kelola

● Sambungan Hal 1

ini gerakan warga yang kita dukung bersama, untuk menyelesaikan permasalahan limbah organik," urai Singgih, Minggu (30/7).

Metodenya pun diberikan keleluasaan, tidak sebatas biopori saja, lantaran masih banyak cara-cara lain, seperti ember tumpuk, atau losida (lodong sisa dapur). Dengan peralatan sederhana, murah, serta sangat mudah diakses, seluruh warga yang berdomisili di Kota Yogyakarta diharapkan bisa ikut berkontribusi.

"Termasuk anak-anak kos," atau asrama, semua bisa melakukan dengan model biopori standar. Atau bisa juga berkolaborasi dengan Pak RT atau Pak RW, silakan, nanti pasti dibantu itu," ucapnya. "Lagipula kita sudah punya banyak bank sampah berbasis RW, mereka yang akan menggiatkan Mbah Dirjo. Harapan kami, limbah organik juga bisa selesai di tingkat mas-

yarakat," lanjut Singgih.

Menurutnya, sebagai bagian dari warga, para pelajar atau mahasiswa yang sehari-hari tinggal di indeks atau asrama di Kota Yogyakarta pun tidak luput dari kewajiban pengolahan limbah. Terlebih, metode yang dijabarkan Pemkot Yogyakarta pun cenderung sederhana, mudah, murah, serta tidak memberatkan.

Dengan jumlah indeks dan asrama mahasiswa yang cukup melimpah di Kota Yogyakarta, permasalahan baru berpotensi muncul ketika alokasi sampah dari sana hanya dibiarkan saja tanpa pengelolaan. "Kita harus guyub, bersama-sama menjadikan limbah organik selesai. Seluruhnya, ya, masyarakat kota, baik rumah tangga, anak-anak kos dan asrama, mereka harus bergerak, ikut peduli," urainya.

Teknologi baru

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditarget untuk memiliki teknologi penrosesan sampah baru pada 2025 atau 2026. Sehingga metode penimbunan *sanitary landfill* di TPA Regional Piyungan nantinya tak akan digunakan

lagi. Asisten 2 Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana mengungkapkan, Pemda DIY menginginkan sistem teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, yang mampu mengolah sekitar 90 persen sampah yang diproduksi masyarakat di tiga kabupaten/kota.

Realisasinya dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). "Ini sedang kita tawarkan ke pihak yang mau memberikan investasi bareng-bareng. Targetnya 2025-2026 sementara nanti masih pakai *sanitary landfill* di Piyungan," jelas Saktiyana, Minggu (30/7).

Metode *sanitary landfill* yang digunakan saat ini tak efektif untuk mengolah sampah. Sebab metode tersebut membutuhkan lahan luas serta berpotensi menimbulkan pencemaran dari limbah air lindi yang meresap ke dalam tanah.

Menurutnya, sudah banyak investor yang menawarkan metode pengolahan sampah di TPA Piyungan. Mulai dengan teknologi insinerator yakni satu alat

pemusnah sampah yang dilakukan dengan pembakaran pada suhu tinggi.

Kemudian juga ada investor yang mampu mengolah sampah menjadi energi listrik. Namun untuk kepastian teknologi yang digunakan masih dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan investor terkait melalui mekanisme KPBU. "Masih dibahas, kan pemda ini juga investor, tanahnya kan milik kita. Kemudian sumber bahan bakunya dari kita. Perlu minimal sampah berapa ton sebagai bahan baku," katanya.

Sementara menunggu proses KPBU selesai, kabupaten/kota diminta untuk mengolah sampah secara terdesentralisasi untuk mengurangi beban TPA Piyungan. Misalnya dengan mengadakan teknologi pengolahan sampah di wilayah masing-masing. "Untuk kota dan kabupaten bisa mengambil langkah-langkah menggunakan teknologi juga kan sampah urusan terdesentralisasi di kota dan kabupaten dan provinsi hanya membantu kesulitan lintas kabupaten," terangnya. (aka/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005